

## **PERS: RUMAH ZAMAN, RUMAH BANGSA<sup>1</sup>** **(Menilik Perkembangan Pers Pada Abad ke-20)**

*Awat! Kaoem Journalist!  
Jadi Journalist zaman sekarang,  
Berani di hukum dan di buang.  
Karena dia yang mesti menendang,  
Semua barang yang melangmalang.*

*Journalist harus berani mati,  
Bekerja berat membanting diri.  
Sebab dia hendak melindungi,  
Guna mencari anak sendiri.*

*Journalis harus bisa berdiri,  
Sendiri juga yang keras hati.  
Dan tidak boleh main komedi  
Guna mencari enak sendiri.*

.....

(Marco Kartodikromo, *Sinar Hindia*, 14 Agustus 1918)

Hadirnya tradisi cetak di Hindia Belanda menjadi simbol kolonial modern sekaligus lahirnya bibit nasionalisme. Munculnya surat kabar di Hindia Belanda tidak dapat dilepaskan dengan berkembangnya teknologi cetak yang hadir pada abad ke 17 (1668). Namun sayang, tenaga operasional untuk mengoperasikan mesin cetak sangat terbatas. Keterbatasan inilah yang memberikan jawaban atas munculnya koran pertama di Hindia Belanda satu dekade berikutnya 1744, dengan nama *Bataviasche Nouvelles*.

Jumlah surat kabar yang muncul pada babak pertama (1744) hingga 1854<sup>2</sup> masih sangat terbatas. Surat kabar yang hadir pada saat itu mutlak dimiliki oleh orang-orang Eropa (Pamodya Ananta Toer menyebutnya "babak putih"). Kepemilikan dan pengelolaan murni dimiliki oleh orang-orang Eropa. Saat itu jumlah pribumi yang bisa membaca sangatlah terbatas, maka tidak mengherankan yang menjadi pembaca adalah orang-orang Eropa dan Tionghoa. Bahasa yang digunakan adalah bahasa Belanda. Pada masa ini surat kabar difungsikan untuk keperluan dagang dan misionaris.

Kemajuan teknologi yang lain yaitu mesin fax tentu saja memberikan pengaruh yang besar bagi perkembangan surat kabar. Akhir abad-19, surat kabar mulai banyak bermunculan di kota-kota besar seperti, Surabaya, Semarang, Makassar, Surabaya, dan Batavia. Orang-orang yang bekerja di bidang surat kabar juga sudah mulai meluas yaitu orang-orang Indo (campuran Hindia Belanda-dan Belanda), seperti Haklema (pernah bergabung *Darmowarsito, Bintang Timor*). Saat itu sudah hadir redaktur pribumi meskipun jumlahnya

---

<sup>1</sup> Oleh Rhoma Dwi Aria Yuliantri, bahan diskusi pada Seminar Nasional, Pendidikan Sejarah 21 November 2012.

<sup>2</sup> Mengacu pada pembabakan pers oleh Ahmad Adam

sangat terbatas, seperti Stefanus Sandiman dan Maas Markus (1880). Bahasa yang banyak dipilih adalah bahasa Melayu Rendah. Bahasa Melayu Tinggi jarang digunakan karena tidak disukai oleh orang-orang Tionghoa (salah satu pelanggan terbesar) karena banyak menggunakan kutipan bahasa Arab. Pada babak ini selain koran dagang, misionaris, berita-berita yang muncul sudah mulai berani mengkritik praktek korupsi yang dilakukan seorang asisten residen atau residen. Sebagai contoh surat kabar *Selompret Melajoe* yang terjerat delik karena dianggap menfitnah dan mencerminkan seorang asisten wedana. Undang-undang yang diberlakukan untuk pers berbahasa melayu untuk urusan seperti ini adalah Pasal 74 UU Pers 1856 tentang pencemaran nama baik, fitnah, terhadap pemuka pribumi. Secara umum hukuman yang dikenakan adalah penjara, denda. Lain halnya dengan koran berbahasa Belanda dapat dikenakan hukuman lebih berat seperti dibreidel, dibuang, dan dilarang tinggal di suatu kota. Menarik dicatat pada babak ini, muncul pula pers Tionghoa *Bintang Soerabaja* (1868) meskipun masih dipimpin oleh jurnalis Belanda, Bounsquet.

Berdasarkan riset yang telah saya lakukan perkembangan pers mulai marak pada abad ke 20. Abad ini bermunculan surat kabar advokasi dan politis seperti *Medan Prijaji*. Tanpa mengesalkan hadirnya surat kabar yang lain, *Medan Prijaji* dapat dijadikan acuan awal surat kabar dengan perusahaan milik pribumi, dipimpin oleh pribumi (RM. Tirta Adhi Soerjo) dengan menyediakan ruang advokasi bagi masyarakat dan **berpolitik**.

Bukti bahwa pers menjadi kunci pergerakan kebangsaan dan nasionalisme pada abad ke 20 adalah hadirnya tokoh-tokoh tokoh pers yang sekaligus menjadi tokoh pergerakan. Mereka memiliki posisi sebagai pemimpin redaksi (*hoofdredakteur*) atau redaktur, seperti Hos Tjokroaminoto adalah pimpinan redaksi *Oetoesan Hindia* dan *Sinar Djawa*. Douwes Dekker, Ki Hajar Dewantara, dan Dr. Tjipto Mangoenkoesoemo mengelola *De Express*. Semaoen (18 tahun) sudah memimpin *Sinar Djawa*. Ki Hadjar Dewantara adalah pemimpin redaksi *Persatoean Hindia*. Soekarno menjadi pemimpin redaksi *Fikiran Ra'jat* dan *Persatoean Indonesia*. Mohammad Hatta dibantu oleh Sjahrir memimpin *Daulat Ra'jat*. Amir Sjarifuddin menjadi pimpinan redaksi *Benteng*. Agus Salim menjadi pimpinan redaksi *Neratja* dan lainnya.

Perkembangan pers pada abad ke 20 menarik dicatat, saat itu bermunculan surat kabar yang menyerukan ideologi -yang dianut oleh para tokoh, maupun menyuarakan organisasi- yang dituangkan dalam lembaran surat kabar. Misalnya, Jong Java memiliki surat kabar *Jong Java* yang banyak diisi oleh golongan terdidik di Jawa. Muhammadiyah juga memiliki surat kabar *Soera Muhammadiyah* (yang masih hadir hingga kini). Bagi yang lebih radikal dan revolusioner (komunis dan atau sosialis) memiliki *Medan Moeslimin* (Marco Kartodikromo), *Sinar Djawa* (Semaoen), *Doenia Bergerak*, *Ra'jat Bergerak*, *Njala*, *Pemberita* dan lainnya. Selain surat kabar yang menjadi suara organisasi atau ideologi tertentu hadir pula surat kabar Tionghoa dan surat kabar yang ditujukan untuk orang-orang Keling (India), yaitu *Pemberita India*. Surat kabar ini diterbitkan di Padang.

Cukup menarik pada dekade ini muncul surat kabar perempuan yang dikelola oleh pribumi dengan nama *Poetri Hindia*.<sup>3</sup> Selain itu pada abad ke 20, muncul pula surat kabar yang memiliki porsi besar dalam pemberitaan olahraga seperti, *Pemberita Betawi*.

---

<sup>3</sup> Tentang Pers Perempuan lihat. Rhoma Dwi Aria dan Hadjar N. Pengantar pada *Seabad Pers Perempuan (190-2008)*.I: Boekoe.

Secara umum surat kabar pada abad ke 20 mewartakan tentang konsep nasionalisme dengan cara mereka sendiri. Ada yang membangkitkan nasionalisme dengan memberitakan nasionalisme di India, Arab, China dan negara-negara lain. Ada yang selalu mengkritik masyarakat bahwa ada yang menyerukan untuk bergabung dalam pemogokan. Selain itu ada pula yang disalurkan lewat cerita pendek bersambung dan lainnya.<sup>4</sup>

### Jalan Perintis Pers Perempuan<sup>5</sup>

Bagaimana wajah pers perempuan Indonesia? Benarkah ia realitas sekaligus pembentuk realitas perempuan Indonesia itu sendiri? Jawabannya barangkali bisa kita saksikan lewat produk penerbitan-penerbitan surat kabar maupun majalah perempuan Indonesia, sejak kali pertama ia ada hingga hari ini ia terus mengada.

*Poetri Hindia* adalah surat kabar buah tangan Raden Mas Tirta Adhi Surjo dan R.T.A. Tirtokoesoemo. Surat kabar ini terbit pertama pada 1 Juli 1908. Tertulis di bawah nama koran, "SOERAT KABAR DAN ADVERTENTIE BOEAT POETRI HINDIA".<sup>i</sup>

Menurut Pram, nama Tirtokoesoemo bupati Karanganyar diterakan sebagai pimpinan *Poetri Hindia* lantaran ia seorang presiden Boedi Oetomo setelah 1909. Selain itu, Tirta punya maksud agar istri sang bupati sudi menulis bahkan terlibat dalam berkala yang terbit dua kali dalam sebulan itu.<sup>ii</sup> Melibatkan istri bupati berarti mempunyai otoritas. Setidaknya, pengetahuan yang didapat dari mengelola koran, membaca maupun menulis di surat kabar khusus perempuan, dapat membangkitkan kesadaran tentang arti pengetahuan dan kemajuan perempuan, serta berimbas pada kaum perempuan di wilayahnya masing-masing. Benar saja, pada terbitan 13 April 1910, nama R.A.S. Tirtokoesoemo tertulis dalam deretan nama *Hoofdredactrices*.

Sebenarnya, ruang bagi wanita pribumi sudah dirintis Tirta Adhisuryo jauh sebelumnya lewat surat kabar berbahasa Melayu *Soenda Berita* (terbit pertama pada Februari 1903). Lembaran wanita itu memuat rubrik-rubrik seputar dunia rumah tangga seperti masakan, menyulam, bordir, jahit, dan lain-lain, yang ditulis sendiri oleh perempuan. Di surat kabar itu pula, Tirta menuliskan pemikirannya yang diberi judul "Pengajaran Buat Perempuan Bumiputera", *Soenda Berita*, Th. II No. 20, 1904.

Tirta kemudian mulai membangun emansipasi perempuan dengan mendirikan *Poetri Hindia*. Besar arti kehadiran koran ini *pertama*, tinimbang ruang wanita pada surat kabar umum, *Poetri Hindia* jauh lebih leluasa menyoal perempuan dengan kuantitas halaman lebih banyak. *Kedua*, *Poetri Hindia* adalah wadaknya jurnalis perempuan menempa diri. Ada banyak nama perempuan bumiputera menjadi Redaktris Kepala dan Redaktris di *Poetri Hindia*. Memang, pada struktur Redaktris Kepala, tercantum kali pertama adalah nama Mevrouw (Nyonya) J. Binkhorst-Martel, yang dari namanya saja, jelas ia bukan perempuan pribumi tulen. Tapi sesudah nama itu, tercantum nama-nama perempuan pribumi meski kebanyakan tidak menggunakan nama asli alias "*nebeng*" nama suami, begitulah yang berlaku pada kebanyakan masyarakat patriarkhis.

---

<sup>4</sup> Tentang ciri-ciri setiap surat kabar pada abad ke-20 lih. *Seabad Pers Kebangsaan*. I: Boekoe.

<sup>5</sup> Diambil dari Pengantar buku *Seabad Pers Perempuan*. 2008. I: Boekoe ditulis oleh Rhoma Dwi Aria Yuliantri & Hajar NS.

Nama-nama perempuan pribumi pada struktur Redaktris Kepala antara lain: R.A. Hendraningrat, istri Hendraningrat yakni Asisten Wedana Teluknaga, Tangerang; R.A.S. Tirtokoesoema, istri bupati Karanganyar; R.A. Soetanandika, Ciamis; Raden Adjeng Fatimah, Mr. Cornelis; R.A. Tirto Adhi Soerjo; S.N.N Salim, Fort de Kock; R.A. Mangkoedimedjo, Yogyakarta; dan R.A. Gandaatmadja, Bandung. Pada tahun penerbitan keempat (1911), posisi Redaktris Kepala dijabat oleh satu orang dan oleh perempuan pribumi yakni, R.A. Hendraningrat.

Sayang sekali, usia koran perempuan pertama yang sempat mengecap masa jaya ini mesti tertahan oleh efek domino sikap kritis Tirto yang berujung susutnya iklan, dan pembuangannya ke Telukbetung dan Ambon.

### **Pers Masa Jepang Hingga Orde Baru**

Pada masa Jepang kebebasan pers seolah-oleh mengalami kemandekan dengan koordinasi terpusat dari pemerintah Jepang. Badan Sensor Jepang cukup ketat mengurus tentang gambar maupun berita-berita, pada masa ini sekira ada 8 surat kabar terbit resmi milik pemerintah Jepang seperti, *Djawa Sjinbun*, *Asia Raya*, *Kung Jung Pao*, *Tjahaya*, *Sinar-Baroe*, *Sinar-Matahari*, *Soera-Asia*. Surat kabar swasta tidak dipernalkan untuk terbit.

Setelah Indonesia merdeka, surat kabar mulai marak lagi. Hampir setiap organisasi politik memiliki surat kabar. Surat kabar masih dianggap sebagai sejanta paling ampuh untuk untuk mencari massa maupun menyebarkan ideologi. Pejabat-pejabat publik pada era ini pun masih mengelola pers sebut saja Joesof Wibisono (Menteri Keuangan Kabinet Soekiman-Soewirjo) mengelola *Mimbar Indonesia*, Njoto (Sekretariat Negara) memimpin *Harian Rakjat*, dan lainnya. PNI (Partai Nasional Indonesia) milik Soekarno memiliki surat kabar *Suluh Indonesia*, militer juga memiliki surat kabar *Berita Yudha* dan *Angkatan Bersenjata*.

Fungsi Pers pada masa orde lama ini cukup jelas seperti termaktup dalam ketetapan MPRS No. II/MPRS/1960 tentang Penerangan Massa, yang menjadikan fungsi pers sebagai landasan Manipol dalam sistem Demokrasi Terpimpin. Hal ini bisa diartikan Pers memiliki fungsi sebagai media yang membangun kesadaran revolusi dan Nasakom. Pada masa ini bahasa yang diperbolehkan untuk media massa adalah huruf Arab, Latin, atau huruf daerah. Pembredelan surat kabar juga acapkali dilakukan oleh pemerintah seperti *Indonesia Raya*, *Harian Rakjat*, *Merdeka*, dan lainnya.

"Bahasa adalah kekuasaan", maka pada masa orde baru surat kabar kembali tersandera hampir dalam semua lini dan aspek. Bahasa yang beragam yang hadir pada koran-koran masa orde lama pun harus mandek dengan Ejaan Yang Disempurnakan ala Orde Baru. (Rhoma Dwi Aria Yuliantri).

---

<sup>i</sup> *Poetri Hindia*, 13 April 1910.

<sup>ii</sup> Pramoedya Ananta Toer, *Sang Pemula*, Lentera Dipantara, Yogyakarta, 2003, hal. 108.